

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Ago Rivaldo Toraja Sitepu¹, Harry Gusti Atmaja², Shakti Ramadhan³, Tamaulina Br Sembiring⁴

Email: Agorivaldo@gmail.com, randagusti052@gmail.com, saktibaik4@gmail.com,
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstract

Infrastructure development is an important part of Indonesia's national development to achieve prosperity and social justice. However, corruption is still a major obstacle to the development process, especially in the infrastructure sector. This research aims to examine efforts to prevent corruption in development in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. The research results show that increasing transparency and accountability, strengthening the goods and services procurement system, active community involvement in development monitoring, and firm law enforcement with integrity can help prevent corruption in development. To realize development that is clean, efficient and oriented towards community welfare and achieving sustainable development in Indonesia, comprehensive and sustainable prevention efforts are very important.

Keywords: *Development, Corruption, Law Enforcement, Prevention of Corruption, Indonesia.*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, korupsi masih menjadi hambatan besar bagi proses pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan korupsi dalam pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, pelibatan masyarakat yang aktif dalam pengawasan pembangunan, dan penegakan hukum yang tegas dan berintegritas dapat membantu mencegah korupsi dalam pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia,

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting.	
--	--

Kata kunci: Pembangunan, Korupsi, Penegakan Hukum, Pencegahan Korupsi, Indonesia.	
--	--

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mampu mendorong kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik, bahkan Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi seluruh negara, termasuk di Indonesia Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi social, politik, maupun budaya. Di Indonesia pembangunan menjadi agenda utama seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1995, yaitu melindungi segenap bangsa, serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. dan juga seperti yang tertera pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960 bahwa ketetapan yang mengatur Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional. Pembangunan ini bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan yang jasmani dan rohani. serta membangun ekonomi nasional yang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pasaran dunia. Dalam Pembangunan yang baik tanpa korupsi Adalah sebuah proses yang adil, transparan, dan akuntabel, Dimana sumber daya dialokasikan secara efisien untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan maupun jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun kelompok, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kejahatan korupsi mencakup beberapa unsur seperti menyalahgunakan sarana, kesempatan dan wewenang, lalu mempunyai tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan berdampak merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum, hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan penyuapan, serta penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu upaya pencegahan korupsi sangat dibutuhkan, Pencegahan korupsi di Indonesia dijalankan melalui berbagai Undang- Undang dan institusi seperti KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi]. Korupsi dalam proses Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah menjadi masalah yang menghambat perkembangan sektor Pembangunan yang berdampak pada kemajuan negara. Tindak korupsi yang terjadi dalam proyek Pembangunan menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan public. Maka dari itu di perlukannya Upaya pencegahan korupsi dalam Pembangunan. memantau Pembangunan infrastruktur yang akan dibangun sangat lah penting dalam Pembangunan yang efisien.¹ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Langkah-langkah Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Solusi Untuk Mencegah Korupsi dalam Pembangunan di Indonesia?

¹ Adzra Livia Amri dkk, "Peran Administrasi Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia". Journal of Innovative and Creativity, vol. 5 No. 2, Tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dalam pembangunan. Pendekatan ini dipilih karena fokus pada penelitian yang terletak pada norma hukum dan implementasinya secara kontekstual.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pembangunan di Indonesia

Hukum pidana khusus salah satunya mengatur tindak pidana korupsi, tetapi ada beberapa hal penting yang membedakannya, seperti adanya penyimpangan hukum acara. Dari sudut pandang regulasi material, ini berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengurangi tingkat kebocoran keuangan dan individu yang dianggap sebagai pelaku atau yang bisa disebut anomali yang merugikan negara. Salah satu tujuan dari memprediksi penyimpangan ini adalah untuk menjamin bahwa roda ekonomi dan pembangunan berputar sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan (Mulyadi, 2001)³. Infrastruktur yang buruk adalah hasil langsung dari korupsi, yang mencakup penggelapan, penyuapan, dan pemerasan. Selama pelaksanaannya, penyuapan dan pemerasan mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur, dan pada saat yang sama, penggelapan menyebabkan pembangunan infrastruktur berkualitas rendah (Amalia, 2022).⁴ Pembangunan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh korupsi yang merajalela. Korupsi dalam dunia politik dapat menghancurkan proses formal, yang mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Korupsi dalam pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi perwakilan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Korupsi dalam sistem pengadilan pasti mengganggu ketertiban dan penegakan hukum, dan korupsi dalam pemerintahan publik pasti menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelayanan di masyarakat. Secara umum, korupsi mengurangi kemampuan lembaga pemerintah karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan pengangkatan dan promosi pejabat tanpa memperhitungkan prestasi mereka. Pada saat yang sama, korupsi menghalangi legitimasi pemerintahan dan menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi seperti toleransi dan kepercayaan pada masyarakat.⁵ Banyak negara di seluruh dunia berfokus pada pembangunan berkelanjutan termasuk juga di Indonesia. Namun, korupsi dapat menghalangi pencapaian tujuan. Korupsi telah terbukti menjadi penghalang utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Korupsi sebenarnya berdampak pada berbagai aspek pembangunan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Jika dana publik disalahgunakan, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau program sosial terbuang begitu saja. Negara dan masyarakat mengalami kerugian akibat pemborosannya. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap

² Tamaulina Br Sembiring dkk, *Metodelogi Penelitian* (Sumatera Barat:PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm.4

³ Dicky Hermawan dkk, *"Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang"*. *Journal of Social Science Research*, vol. 4 No. 1, Tahun 2024

⁴ Ibid

⁵ Lamijan dan Mohamad Tohari, *"Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik"*. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, hal. 46.

lembaga pemerintah dan proses pembangunan. Kepercayaan yang rusak dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan menghambat kerja sama antara sektor publik dan swasta.⁶ Infrastruktur yang baik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, korupsi dalam manajemen proyek infrastruktur sering menyebabkan kualitas pembangunan yang buruk, proyek yang tertunda, dan biaya yang tidak wajar. Kambey et al. (2024) menyatakan bahwa evaluasi penerapan belanja modal dalam proyek infrastruktur menunjukkan bahwa dana tidak digunakan dengan efisien karena korupsi. Penggunaan bahan yang tidak sesuai standar menyebabkan banyak kerusakan pada proyek infrastruktur yang cepat. Hal ini meningkatkan beban anggaran pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu yang lebih singkat dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.⁷ untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukanlah upaya-upaya pencegahan korupsi dalam pembangunan di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat diterapkan antara lain seperti:

a). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dua pilar utama pemerintahan yang bersih dan efektif adalah transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi pemerintahan merupakan komponen penting untuk membangun dasar yang kokoh bagi demokrasi yang sehat, karena memungkinkan pemerintah beroperasi secara terbuka di hadapan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga independen dan masyarakat dapat mengawasi setiap tahapan proyek pembangunan infrastruktur.⁸

b). Peningkatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Dibutuhkannya upaya untuk memperkuat sistem PBJ untuk mencegah korupsi di pembangunan karena PBJ melibatkan banyak dana. Sistem tender proyek harus transparan dan meminimalkan intervensi pihak tertentu. Peningkatan efisiensi sistem barang dan jasa akan menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, layanan publik yang lebih efisien, dan peningkatan kepercayaan publik, yang semuanya merupakan pilar pembangunan ekonomi dan sosial yang kokoh.⁹

c). Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

⁶ Reza Oktavia, *"Dampak dan Solusi dalam Korupsi terhadap Pembangunan Berkelanjutan"* (<https://www.lazismujawabarat.org/dampak-dan-solusi-dalam-korupsi-terhadap-pembangunan-berkelanjutan/>), Diakses pada 18 Desember 2025).

⁷ Ike Yulandari Putri, *"Praktik Korupsi Mempengaruhi Kualitas Infrastruktur"* (<https://klop.pu.go.id/knowledge/Praktik-Korupsi-Mempengaruhi-Kualitas-Infrastruktur> Diakses pada 19 Desember 2025).

⁸Wanda Aprilla dkk, *"Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi"*. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.2 No.4, Tahun 2024, hal 324.

⁹ Faza Rahmania dkk, *"Analisis Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Menggunakan Metode E-Procurement"*. Jurnal Ilmiah Research Student, vol. 1 No. 4 Tahun 2024, hal. 81.

Menurut Adisasmita dalam Solekhan (2014:141), keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan didefinisikan sebagai "partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada masyarakat setempat." Dengan kata lain, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan dengan efektif, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan ini dicapai melalui kerja sama yang efektif antara masyarakat dan pemerintah.¹⁰

d). Penegakan Hukum yang Kuat

Keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum. Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan keinginan politik pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi. dan juga pihak berwenang harus bisa memberikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi agar memberikan efek jera.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Salah satu kendala utama dalam proses pembangunan di Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, adalah korupsi. Selain itu, korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan anggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan, menyebabkan infrastruktur yang buruk, pemborosan keuangan negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi juga mempengaruhi aspek ekonomi, politik, dan sosial secara keseluruhan, dengan melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya pencegahan korupsi dalam pembangunan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan, serta penegakan hukum yang tegas dan berintegritas. Pembangunan yang bersih, efektif, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat memerlukan kerja sama yang efektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Upaya pencegahan yang kuat diharapkan akan memungkinkan pembangunan di Indonesia berjalan secara adil, berkelanjutan, dan bebas dari korupsi.

SARAN

Untuk menghentikan korupsi dalam pembangunan di Indonesia, perlu ada pendekatan komprehensif yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. saran-saran ini mencakup aspek sistemik, kelembagaan, dan partisipasi publik.

¹⁰ Sri Miliyani dkk, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa -Desa Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara"*. Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia, vol. 2 No.1 Tahun 2025.

¹¹ Muhammad Riswan, *"Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan"*. <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/> Diakses pada 20 Desember 2025.

Jika dilaksanakan secara bersamaan, pembangunan di Indonesia diharapkan lebih efisien, efektif, dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54-76.
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation against Corruption. *Finance & Development*, 35. <https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf>
- Mulyadi, L. (2001). Tindak pidana korupsi:(tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999M). Citra Aditya Bakti.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: "Berbasis Partisipasi Masyarakat". Setara Press. Malang.